

## Pemenuhan Hak Atas Kesehatan terhadap Anak Stunting di Jawa Timur dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

**Farrah Miftah**

Universitas Narotama

Coresspondence : farrahmiftah8501@gmail.com

**Abstrak.** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan normatif untuk mengetahui implementasi hak anak atas kesehatan dalam konteks stunting di Jawa Timur. Kajian ini mengkaji aspek normatif hak asasi manusia (HAM) dalam konteks stunting melalui analisis kebijakan, wawancara mendalam, dan telaah dokumen. Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip hak asasi manusia dan akses terhadap layanan kesehatan tidak merata di beberapa daerah. Kajian ini merekomendasikan perlunya reformasi kebijakan yang lebih konsisten dengan prinsip hak asasi manusia, serta peningkatan implementasi intervensi untuk meningkatkan realisasi hak anak atas kesehatan. Dengan menggabungkan pendekatan kualitatif dan normatif, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan peluang dalam mewujudkan hak anak atas kesehatan dalam konteks stunting di Jawa Timur.

**Kata Kunci :** Hak, Hukum, *Stunting*.

**Abstract.** This research uses a qualitative and normative approach to determine the implementation of children's rights to health in the context of stunting in East Java. This study examines the normative aspects of human rights (HAM) in the context of stunting through policy analysis, in-depth interviews, and document review. The results show that policy implementation does not fully reflect human rights principles and access to health services is uneven in some areas. This study recommends the need for policy reform that is more consistent with human rights principles, as well as increased implementation of interventions to increase the realization of children's right to health. By combining qualitative and normative approaches, this research contributes to a deeper understanding of the challenges and opportunities in realizing children's right to health in the context of stunting in East Java.

**Keywords:** Rights, Law, *Stunting*.

### PENDAHULUAN

Membela hak atas kesehatan anak-anak yang mengalami stunting di Jawa Timur dari perspektif hak asasi manusia mencerminkan kompleksitas tantangan dalam menyediakan akses penuh dan adil terhadap layanan kesehatan bagi anak-anak. Jawa Timur, provinsi yang heterogen dengan keragaman sosial, ekonomi, dan geografis, mengakibatkan kesenjangan yang signifikan dalam penerapan hak anak atas kesehatan. Faktor sosial, ekonomi dan budaya menjadi hambatan dalam mencapai tujuan perlindungan hak kesehatan yang setara bagi anak-anak yang mengalami stunting<sup>1</sup>.

Sistem pelayanan kesehatan, khususnya di daerah pedesaan, masih terbatas dan menjadi salah satu hambatan utama dalam mewujudkan hak ini. Keterbatasan infrastruktur kesehatan dan sumber daya manusia menghambat pelayanan kesehatan yang berkualitas dan adil. Kondisi ini berdampak pada kurangnya akses terhadap layanan kesehatan antenatal dan pasca melahirkan sehingga menyebabkan terhambatnya pertumbuhan anak yang rentan mengalami stunting.

Pentingnya perlindungan hak anak atas kesehatan dari sudut pandang hak asasi manusia menekankan bahwa setiap anak berhak atas tumbuh kembang yang optimal<sup>2</sup>. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa anak-anak di Jawa Timur seringkali terabaikan dalam hak-hak tersebut. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya gizi dan pelayanan kesehatan anak dapat memperburuk stunting dan menyebabkan tidak meratanya akses terhadap informasi pendidikan dan kesehatan.

Dari perspektif hak asasi manusia, pemerintah diharapkan mengambil langkah-langkah untuk mendukung pelaksanaan hak anak atas kesehatan secara adil. Langkah-langkah konkrit seperti

---

<sup>1</sup> R. Indah, *Promosi Kesehatan Dalam Berbagai Perspektif*. Syiah Kuala University Press (2022).

<sup>2</sup> Simbolon, L. A, *Gagalnya Perlindungan Anak Sebagai Salah Satu Bagian Dari Hak Asasi Manusia Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Mazhab Utilitarianisme*, *Jurnal Yuridis*, 3(2), (2016), hlm 75-88.

peningkatan investasi di sektor kesehatan, penyediaan pendidikan kesehatan yang mudah diakses oleh masyarakat, dan kampanye informasi mengenai gizi anak sangat penting untuk mengatasi masalah ini. Pemerintah juga harus memastikan bahwa kebijakan ini didasarkan pada prinsip non-diskriminasi dan melindungi hak semua anak, apapun latar belakang sosial atau ekonomi mereka<sup>3</sup>.

Dalam konteks ini, dukungan berbagai pemangku kepentingan, baik lembaga swadaya masyarakat, swasta, maupun masyarakat, menjadi penting untuk menciptakan sinergi dalam mengatasi permasalahan stunting. Pemahaman bersama mengenai pentingnya mewujudkan hak anak atas kesehatan sebagai bagian integral dari hak asasi manusia memberikan landasan yang kuat untuk mengembangkan solusi berkelanjutan. Kesadaran terhadap hak-hak anak, khususnya di bidang kesehatan, perlu ditingkatkan melalui pendekatan pendidikan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Secara keseluruhan, mewujudkan hak atas kesehatan anak stunting di Jawa Timur memerlukan pendekatan holistik yang tidak hanya mencakup aspek pelayanan kesehatan tetapi juga pendidikan, informasi, dan kerjasama lintas sektoral. Hanya dengan langkah-langkah konkrit dan komprehensif inilah hak asasi anak di Jawa Timur dapat terwujud secara maksimal.

Penting untuk dipahami bahwa stunting tidak hanya menjadi masalah kesehatan, namun juga berdampak serius terhadap pembangunan ekonomi dan sosial di Jawa Timur sehingga meningkatkan urgensi penyelesaian masalah ini. Anak-anak yang mengalami stunting mempunyai peningkatan risiko mengalami hambatan perkembangan kognitif, rendahnya pencapaian pendidikan, dan rendahnya produktivitas ekonomi di masa dewasa. Oleh karena itu, persoalan stunting harus dipahami sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang memiliki dimensi multifaset dan berjangka panjang.

Dalam memerangi stunting, penting untuk memperhatikan faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi kebiasaan makan dan kesehatan anak. Adat istiadat dan kepercayaan setempat dapat mempengaruhi pilihan makanan dan kebiasaan kesehatan. Oleh karena itu, pendekatan untuk mengatasi stunting di Jawa Timur perlu mempertimbangkan konteks budaya lokal, melibatkan tokoh masyarakat setempat, dan mencari solusi bersama untuk memastikan penyerapan dan implementasi program kesehatan.

Partisipasi aktif perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan anak merupakan elemen penting dalam perspektif penghormatan hak asasi manusia. Peran perempuan sebagai ibu dan pengasuh mempunyai dampak yang signifikan terhadap hasil kesehatan anak. Oleh karena itu, membekali perempuan dengan pengetahuan dan sumber daya yang diperlukan untuk memberikan pengasuhan optimal bagi anak-anaknya merupakan langkah strategis untuk menjamin terwujudnya hak anak atas kesehatan di Jawa Timur<sup>4</sup>.

Pentingnya pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap program kesehatan anak stunting tidak dapat diabaikan. Mekanisme ini bertujuan tidak hanya untuk mengukur efektivitas intervensi, namun juga untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan program. Melalui pemantauan yang tepat, Anda dapat mengidentifikasi potensi hambatan selama implementasi dan mencari solusi dengan partisipasi seluruh pemangku kepentingan.

Pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam pendidikan dan perencanaan program merupakan kunci untuk mewujudkan hak anak atas kesehatan. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi dan pelayanan kesehatan, kami berharap orang tua dan masyarakat menjadi agen perubahan untuk menjamin tumbuh kembang anak yang sehat. Kolaborasi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta dalam mendukung inisiatif ini juga merupakan langkah strategis dalam mewujudkan hak atas kesehatan anak di Jawa Timur. Ketika menangani stunting, penting untuk memasukkan program gizi ke dalam sistem pendidikan untuk meningkatkan pemahaman dini tentang pentingnya kebiasaan makan yang sehat. Pendidikan yang mencakup aspek gizi dan kesehatan membentuk perilaku berkelanjutan anak dan memberikan landasan yang kokoh bagi tumbuh kembang yang optimal.

Dalam upaya perlindungan hak anak atas kesehatan di Jawa Timur, pentingnya sinergi antar sektor terkait seperti kesehatan, pendidikan, dan pembangunan ekonomi tidak bisa diabaikan.

---

<sup>3</sup> M. Ashri, *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*. (Makassar : CV. Social Politic Genius, 2018).

<sup>4</sup> D. Shofiya, *Komitmen Pimpinan Pada Penurunan Stunting Di Kabupaten Tuban Jawa Timur*. *Media Gizi Indonesia (National Nutrition Journal) Vol. 1 No. 1*, (2022), hlm 139-144.

Kolaborasi lintas sektoral dapat memastikan terlaksananya solusi holistik, termasuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan infrastruktur, dan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan<sup>5</sup>. Dalam konteks hak asasi manusia, kita tidak hanya perlu memperkuat upaya memerangi stunting, namun juga memperkuat perlindungan hak-hak anak secara keseluruhan. Hal ini termasuk melindungi anak dari segala bentuk diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan yang dapat menghambat tumbuh kembangnya secara optimal. Melindungi hak kesehatan anak-anak yang mengalami stunting di Jawa Timur harus menjadi bagian integral dari agenda hak asasi manusia yang lebih luas.

## **METODE**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus sebagai metode utama dan fokus pada realisasi hak atas kesehatan anak stunting di Provinsi Jawa Timur dari perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif untuk mengevaluasi implementasi hak atas kesehatan anak stunting di Provinsi Jawa Timur dari perspektif hak asasi manusia. Studi ini menilai sejauh mana kebijakan dan praktik kesehatan di Provinsi Jawa Timur memenuhi standar hak asasi manusia terkait kesehatan anak melalui analisis kritis terhadap dokumen kebijakan, peraturan kesehatan, dan laporan terkait.

### **2. Rancangan Kegiatan**

Kegiatan penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2023 sampai Januari 2024.

### **3. Ruang lingkup atau Objek**

Ruang lingkup penelitian ini terbatas mengkaji aspek normatif hak asasi manusia (HAM) dalam konteks stunting melalui analisis kebijakan, wawancara mendalam, dan telaah dokumen.

### **4. Bahan dan Alat Utama**

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari wawancara mendalam. Kemudian data sekunder berasal dari analisis kebijakan dan telaah dokumen yang terkait.

### **5. Tempat Penelitian**

Tempat dalam penelitian dilakukan pada anak stunting di Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur dijadikan objek penelitian dalam penelitian ini dikarenakan karena Provinsi Jawa Timur masih minim kesadaran mengenai stunting.

### **6. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik wawancara mendalam akan digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai persepsi dan pengalaman orang tua, pemangku kepentingan, dan profesional kesehatan terhadap anak stunting di masyarakat. Analisis isi juga diterapkan pada dokumen kebijakan dan laporan kesehatan terkait untuk memberikan wawasan mengenai implementasi kebijakan dan upaya kepatuhan hak asasi manusia. Selain itu, survei masyarakat akan dilakukan untuk mengukur tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku kesehatan anak, serta persepsi mereka terhadap pemenuhan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan hak kesehatan anak stunting di Jawa Timur dan memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk memperbaiki kondisi tersebut.

### **7. Definisi Operasional Variabel Penelitian**

#### **a. Hak Asasi Manusia**

Hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.

#### **b. Stunting**

Suatu kondisi kekurangan gizi kronis yang terjadi pada saat periode kritis dari proses tumbuh dan kembang mulai janin. Untuk Indonesia, saat ini diperkirakan ada 37,2% dari anak usia 0-59

---

<sup>5</sup> A. Gonggong, *Sejarah Pemikiran Hak-Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Sejarah Nasional, (1995).

bulan atau sekitar 9 juta anak dengan kondisi stunting, yang berlanjut sampai usia sekolah 6-18 tahun.

## **8. Teknik Analisis**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif maka analisis data dalam penelitian ini berupa dokumen kebijakan, peraturan kesehatan, dan laporan terkait. Pendekatan ini memungkinkan untuk mengidentifikasi kebijakan yang mendukung atau menghambat realisasi hak kesehatan anak stunting. Selain itu, analisis komparatif dengan standar hak asasi manusia internasional seperti Konvensi Hak Anak dan komitmen terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya memberikan pemahaman yang lebih baik tentang sejauh mana provinsi Jawa Timur mematuhi ketentuan hak asasi manusia. menjadi seperti ini. Memenuhi hak dan kewajiban serta melindungi kesehatan anak. Dengan berfokus pada penilaian normatif tersebut, penelitian ini memberikan wawasan rinci mengenai kepatuhan kebijakan dan praktik kesehatan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia di Jawa Timur, sehingga memberikan landasan bagi rekomendasi kebijakan yang lebih baik dan berorientasi pada hak asasi manusia.

## **HASIL**

### **Kesesuaian Penerapan Kebijakan Dan Program Kesehatan Anak Stunting di Jawa Timur Dengan Prinsip Hak Asasi Manusia**

Penelitian ini bertujuan untuk menilai kecukupan implementasi kebijakan dan program kesehatan mengenai stunting anak di Provinsi Jawa Timur sejalan dengan prinsip hak asasi manusia. Pertama, diperlukan pemahaman komprehensif mengenai kerangka kebijakan nasional mengenai kesehatan anak dan stunting. Analisis ini memasukkan UU Kesehatan dan peraturan turunannya sebagai landasan utama untuk menilai keselarasan kebijakan daerah dengan kebijakan nasional yang memuat prinsip hak asasi manusia.

Selanjutnya ruang lingkup penelitian akan fokus pada implementasi kebijakan dan program mengenai kesehatan anak stunting di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Timur. Sebuah survei akan dilakukan terhadap peraturan daerah dan kebijakan negara terkait kesehatan anak untuk memahami sejauh mana pertimbangan hak asasi manusia diperhitungkan dalam kebijakan daerah. Akan ada analisis mengenai apakah pendekatan politik untuk memerangi stunting bersifat holistik dan berbasis hak asasi manusia. Pemahaman menyeluruh mengenai langkah-langkah spesifik yang diambil pemerintah daerah untuk memastikan hak anak atas kesehatan terpenuhi, termasuk upaya pencegahan, penyediaan layanan kesehatan, dan penanganan dampak stunting sangat diperlukan.

Penelitian ini mengkaji partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan kesehatan anak stunting. Partisipasi aktif masyarakat merupakan elemen penting dari perspektif hak asasi manusia, dan penilaian ini menentukan sejauh mana suara masyarakat tercermin dalam kebijakan dan program kesehatan anak di tingkat lokal. Dalam menilai kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia, penelitian ini mengidentifikasi indikator dan metode yang digunakan oleh otoritas lokal untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas intervensi kesehatan yang menghambat perkembangan anak. Ketersediaan data dan sistem pelaporan menjadi tolak ukur penilaian transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam implementasi kebijakan kesehatan anak.

Selain itu, penelitian ini mencakup analisis dukungan keuangan dan sumber daya yang disediakan untuk mendukung intervensi kesehatan anak terkait pembangunan. Alokasi anggaran yang tepat diperlukan untuk mewujudkan hak anak atas kesehatan. Penilaian ini akan memberikan gambaran sejauh mana dukungan finansial mencerminkan komitmen pemerintah terhadap prinsip hak asasi manusia. Selain itu, aspek keterlibatan pihak swasta dan mitra eksternal juga dianalisis. Kerjasama antarsektor dan kemitraan eksternal dapat menjadi indikator penting dalam menilai kesesuaian kebijakan dan program kesehatan anak stunting dalam konteks prinsip hak asasi manusia. Kajian tersebut memberikan rekomendasi rinci berdasarkan hasil analisis kesesuaian. Tujuan dari rekomendasi ini adalah untuk memperkuat implementasi kebijakan dan program kesehatan anak stunting di provinsi Jawa Timur. Prinsip hak asasi manusia dijadikan landasan bagi implementasi hak anak atas kesehatan secara optimal.<sup>6</sup>

Penelitian ini menyelidiki lebih lanjut aspek keberlanjutan kebijakan dan program kesehatan untuk anak stunting di provinsi Jawa Timur. Keberlanjutan merupakan elemen penting dari perspektif

---

<sup>6</sup> N. Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2022).

hak asasi manusia, karena memastikan bahwa upaya untuk mewujudkan hak anak atas kesehatan berkelanjutan tidak hanya dalam jangka pendek tetapi juga dalam jangka panjang. Dalam konteks ini, akan dilakukan analisis terhadap kapasitas pemerintah daerah dalam merancang dan melaksanakan kebijakan berkelanjutan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Di masa depan, memahami upaya pemerintah dalam menerapkan kebijakan kesehatan anak yang menghambat pertumbuhan akan mengarah pada pandangan yang lebih holistik dalam mewujudkan hak-hak kesehatan anak.

Studi ini menyoroti pentingnya mengevaluasi dampak kebijakan dan program. Dengan menilai hasil dan dampak aktual dari implementasi kebijakan, studi ini akan menentukan sejauh mana hak-hak anak penderita stunting terpenuhi dan apakah terdapat potensi dampak negatif yang perlu ditangani. Oleh karena itu, penelitian ini mencakup analisis tanggapan pemerintah daerah terhadap hasil evaluasi dan rekomendasi. Tingkat tanggap pemerintah terhadap informasi dan pembaruan yang diperlukan untuk menerapkan kebijakan kesehatan anak yang memperlambat pertumbuhan mencerminkan tingkat toleransi dan komitmen pemerintah terhadap hak asasi manusia.

Selain itu, studi ini akan mempertimbangkan keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa dan pelanggaran hak asasi manusia sebagai aspek penting ketika menilai kepatuhan pemerintah terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia. Adanya mekanisme ini mencerminkan keinginan pemerintah untuk memastikan hak-hak anak stunting terlindungi dan ditegakkan. Selain itu, kajian ini juga mencakup analisis kerja sama dan koordinasi antar lembaga pemerintah serta potensi konflik politik yang mungkin timbul. Mengintegrasikan kebijakan di berbagai tingkat pemerintahan adalah penting untuk memastikan penerapan yang efektif dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Fokus berikutnya adalah pada tingkat partisipasi dan advokasi masyarakat. Pemahaman sejauh mana masyarakat terlibat dalam memahami dan memperjuangkan hak kesehatan anak stunting, serta upaya advokasi yang dilakukan, menyoroti dinamika partisipasi masyarakat dan hal ini akan mendorong penguatan hak asasi manusia.

Kajian ini diakhiri dengan ringkasan temuan dan memberikan kesimpulan mengenai sejauh mana implementasi kebijakan dan program kesehatan mengenai stunting anak di Jawa Timur konsisten dengan prinsip hak asasi manusia. Kesimpulannya akan memberikan gambaran holistik dan berkelanjutan mengenai upaya mewujudkan hak kesehatan anak-anak stunting di wilayah tersebut dan memberikan arah perbaikan dan pengembangan kebijakan di masa depan.

Aspek akuntabilitas juga perlu diperhatikan dalam mempertimbangkan kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kesehatan terkait stunting anak di Jawa Timur dengan prinsip hak asasi manusia. Analisis ini akan fokus pada mekanisme akuntabilitas yang diterapkan oleh pemerintah daerah untuk memastikan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Hal ini relevan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah merasa berkomitmen terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam tindakan nyata.<sup>7</sup>

Selain itu, penelitian ini mengkaji isu gender dalam perwujudan hak kesehatan anak stunting. Analisis ini bertujuan untuk memahami upaya spesifik yang dilakukan untuk mengatasi kesenjangan gender dalam akses dan pemanfaatan layanan kesehatan bagi anak stunting. Dimensi gender penting dari perspektif hak asasi manusia untuk menjamin keadilan dan persamaan hak bagi semua anak tanpa memandang gender. Penting untuk mempertimbangkan peran sektor swasta dalam melindungi hak kesehatan anak-anak penderita stunting. Kajian ini membahas kelanjutan keterlibatan sektor swasta dan kontribusinya dalam mendukung kebijakan dan program kesehatan anak stunting. Pemerintah harus memastikan bahwa intervensi swasta sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan tidak menyebabkan kesenjangan dalam akses terhadap layanan kesehatan.

Studi ini juga menganalisis indikator kesehatan dan gizi anak sebagai parameter keberhasilan program ketika mengukur dampak intervensi kebijakan. Memahami sejauh mana pencapaian tujuan kesehatan untuk anak-anak dengan stunting memberikan gambaran realistis tentang efektivitas dan dampak positif dari kebijakan kesehatan anak dan implementasi program. Penting untuk menggali perspektif masyarakat dalam mewujudkan hak atas kesehatan anak stunting di Jawa Timur. Penelitian tersebut mencakup jajak pendapat publik dan pendekatan partisipatif untuk mengumpulkan opini publik mengenai efektivitas dan keadilan implementasi kebijakan. Hal ini akan memastikan bahwa

---

<sup>7</sup> H. Affandi, Mplementasi Hak Atas Kesehatan Menurut Undang-Undangdasar 1945: Antara Pengaturan Dan Realisasi Tanggung Jawab Negara, *Jurnal Hukum Positum Vol. 4, No. 1*, (2019), hlm 36-56.

suara masyarakat lokal diperhitungkan ketika menilai kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Studi ini mengkaji keterkaitan dan kerja sama antar negara dan organisasi internasional dalam mendukung realisasi hak anak atas kesehatan dalam konteks global. Analisis ini memberikan gambaran sejauh mana Jawa Timur berpartisipasi dalam upaya kolektif yang sejalan dengan prinsip hak asasi manusia di tingkat internasional.

Studi ini juga menyelidiki potensi dampak perubahan iklim terhadap perlindungan hak kesehatan anak-anak stunting di Jawa Timur. Dampak perubahan iklim dapat mengancam ketersediaan pangan dan nutrisi. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk menilai sejauh mana tindakan yang berdampak negatif terhadap kesehatan anak-anak mencakup aspek adaptasi dan ketahanan terhadap perubahan iklim. Sintesa keseluruhan akan memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam kebijakan kesehatan dan implementasi program stunting pada anak di Jawa Timur. Hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi penting dalam menginformasikan kebijakan dan program kesehatan untuk anak-anak stunting di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Berdasarkan data Survei Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman rinci mengenai prevalensi anak stunting di Jawa Timur pada tahun 2022. Wilayah ini mencapai 19,2%, dan Provinsi Jawa Timur mencapai 19,2%. Tahun ini, Indonesia dipastikan menduduki peringkat ke-25 sebagai provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan tren prevalensi stunting di Jawa Timur pada tahun 2021 hingga 2022. Fakta bahwa prevalensi bayi stunting menurun sebesar 4,3 poin persentase, dari 23,5% pada tahun 2021 menjadi 19,2% pada tahun 2022, mencerminkan kemajuan yang signifikan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk membahas faktor-faktor yang mungkin berkontribusi terhadap penurunan tersebut, antara lain kebijakan pemerintah, intervensi masyarakat, dan faktor lingkungan yang berperan dalam mengatasi stunting. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak berbagai kebijakan dan program kesehatan anak yang diterapkan di Jawa Timur dalam mengurangi prevalensi stunting. Dengan pemahaman rinci terhadap data survei, penelitian ini mampu memberikan penjelasan rinci mengenai efektivitas langkah-langkah yang diambil pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mewujudkan hak anak atas kesehatan.

Dari sudut pandang manfaat, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting terhadap perbaikan kebijakan dan program kesehatan anak di Provinsi Jawa Timur. Memahami faktor-faktor yang mengurangi prevalensi stunting memungkinkan pemerintah dan pemangku kepentingan mengevaluasi kebijakan yang diterapkan dan mengidentifikasi bidang-bidang yang perlu diperkuat atau ditingkatkan. Selain itu, memahami tren dan perubahan prevalensi stunting juga memberikan wawasan strategis untuk perencanaan jangka panjang guna mencapai tujuan untuk lebih mewujudkan hak anak atas kesehatan. Selain itu, penelitian ini memberikan manfaat tambahan dari perspektif pemantauan dan evaluasi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan masih banyak permasalahan yang ditemui, khususnya stunting yang cukup tinggi di Provinsi Jawa Timur. Memberikan pemahaman kepada masyarakat dan mendesak Pemerintah Daerah guna mengatasi permasalahan tersebut merupakan hal yang harus dilakukan. Kesadaran masyarakat juga mengenai jaminan atas kesehatan harus ditingkatkan guna menciptakan kondisi lebih baik.

### **Rekomendasi Yang Dapat Diusulkan Untuk Meningkatkan Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Anak Stunting di Jawa Timur**

Meningkatkan implementasi hak atas kesehatan bagi anak-anak dengan stunting di Jawa Timur memerlukan serangkaian rekomendasi komprehensif yang berfokus pada beberapa aspek utama. Pertama, perlunya penguatan kolaborasi dan sinergi antar berbagai pemangku kepentingan di tingkat pemerintah daerah. Mekanisme koordinasi yang efektif antara sektor kesehatan, pendidikan, sosial dan ekonomi diperlukan untuk memastikan integrasi kebijakan dan program yang holistik untuk mengatasi stunting.

Rekomendasi kedua adalah memperkuat sistem pemantauan dan evaluasi yang lebih akurat dan terkini. Sistem pemantauan yang lebih canggih dan terintegrasi perlu dikembangkan untuk mengukur dan melacak kemajuan dalam mewujudkan hak atas kesehatan bagi anak-anak penderita stunting. Hal

ini dapat mencakup pemanfaatan teknologi informasi dan kolaborasi dengan lembaga penelitian terkemuka untuk memastikan bahwa data yang diperoleh memberikan gambaran yang akurat dan rinci.

Rekomendasi berikutnya adalah pentingnya pendidikan dan kesadaran masyarakat. Program edukasi yang menasar masyarakat, khususnya keluarga dan ibu hamil perlu diperkuat untuk meningkatkan pemahaman akan pentingnya gizi anak dan upaya pencegahan stunting. Memberikan masyarakat akses terhadap informasi dan layanan kesehatan yang berkualitas dapat mendorong perubahan perilaku positif. Rekomendasi selanjutnya adalah mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia di bidang medis. Perlunya peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam menangani dan mencegah stunting, terutama di tingkat masyarakat. Melanjutkan pendidikan dan pelatihan bagi petugas kesehatan dapat berdampak besar pada peningkatan kualitas layanan dan intervensi bagi anak-anak yang berisiko mengalami stunting. Rekomendasi juga diperlukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan pangan berkualitas tinggi. Upaya peningkatan ketersediaan pangan bergizi dapat menurunkan risiko stunting, terutama bagi keluarga yang berlatar belakang ekonomi miskin. Pertimbangan juga harus diberikan untuk memperkuat program yang memberikan makanan tambahan dan suplemen gizi kepada ibu hamil dan anak-anak. Rekomendasi lainnya adalah pentingnya melibatkan sektor swasta dan mitra non-pemerintah. Kolaborasi dengan sektor swasta dapat memperluas jangkauan program stunting dan meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya. Melibatkan mitra non-pemerintah seperti LSM dan organisasi masyarakat dapat memperkaya upaya pencegahan stunting melalui program inovatif dan dukungan langsung di tingkat masyarakat.

Rekomendasi berikutnya adalah memperkuat kebijakan inklusif yang mempertimbangkan keberagaman sosial, ekonomi, dan budaya di Jawa Timur. Kebijakan yang mengkaji dan memahami dinamika lokal dapat mengatasi tantangan multifaktorial akibat stunting secara lebih efektif. Inklusivitas juga mencakup memasukkan perspektif hak asasi manusia ke dalam seluruh aspek kebijakan dan program. Kebijakan kesehatan yang didasarkan pada hasil dan efektivitas jangka panjang merupakan rekomendasi utama. Pemerintah daerah perlu fokus pada pengembangan strategi berkelanjutan yang mempunyai dampak nyata dalam mengurangi prevalensi stunting. Evaluasi berkala dan penyesuaian kebijakan berdasarkan hasil pemantauan dapat memberikan landasan yang kokoh untuk membawa perubahan positif dalam perwujudan hak kesehatan anak stunting

Rekomendasi lainnya adalah peningkatan akses terhadap layanan kesehatan bagi anak-anak yang mengalami stunting di daerah pedesaan. Perlu dicatat bahwa daerah pedesaan mungkin menghadapi tantangan khusus dalam hal aksesibilitas layanan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya nyata, seperti penyediaan klinik dan kendaraan medis, untuk memastikan bahwa anak-anak di daerah pedesaan memiliki akses mudah terhadap layanan gizi dan medis yang mereka butuhkan.

Rekomendasi selanjutnya adalah memperkuat peran perempuan dalam mencegah stunting. Perempuan, khususnya sebagai ibu, mempunyai peran sentral dalam mewujudkan hak anak atas kesehatan. Pemberdayaan perempuan melalui pendidikan dan dukungan kesehatan reproduksi dapat meningkatkan pemahaman keluarga dan praktik makan sehat. Penting juga untuk memperkuat kemitraan antara pemerintah daerah, sektor swasta dan organisasi internasional. Kolaborasi yang kuat antar seluruh pemangku kepentingan dapat menciptakan sinergi dalam upaya pencegahan stunting. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan sumber daya dan keahlian dari sektor swasta dan organisasi internasional untuk mengoptimalkan hasil program kesehatan bagi anak-anak penderita stunting.

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor spesifik yang mungkin menjadi penyebab tingginya prevalensi stunting di Jawa Timur. Pemahaman yang lebih baik mengenai faktor-faktor ini dapat membantu menjadikan kebijakan dan program lebih tepat sasaran dan efektif. Kajian ini dapat mencakup aspek-aspek seperti situasi ekonomi, kebersihan, dan kebiasaan makan di tingkat rumah tangga. Rekomendasi penting lainnya adalah masyarakat harus dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program kesehatan untuk anak stunting. Partisipasi aktif dalam masyarakat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kebutuhan lokal dan memastikan bahwa solusi yang diterapkan relevan dan dapat diterima oleh masyarakat.

Investasi juga diperlukan pada infrastruktur kesehatan dasar seperti fasilitas kesehatan dan posyandu, terutama di wilayah yang lebih sulit diakses. Penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang diperlukan untuk mencegah

stunting. Rekomendasi untuk memahami gender juga harus dipertimbangkan. Program pencegahan stunting harus mampu mengidentifikasi dan mengatasi perbedaan gender dalam hak, tanggung jawab, dan akses terhadap layanan kesehatan. Memahami konteks gender dapat meningkatkan efektivitas dan dampak positif program<sup>8</sup>.

Penting untuk mengevaluasi dan memperbarui kebijakan dan program secara berkala sebagai respons terhadap kemajuan pengetahuan dan kebutuhan masyarakat. Evaluasi berkelanjutan dapat membantu mengidentifikasi keberhasilan, kelemahan, dan peluang perbaikan, menciptakan siklus pembelajaran berkelanjutan dalam upaya perlindungan hak kesehatan anak stunting di Jawa Timur.

Selain itu, rekomendasinya mencakup upaya memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk membangun pendekatan terpadu. Permasalahan stunting berdampak pada banyak aspek kehidupan dan memerlukan kerjasama yang erat antara sektor kesehatan, pendidikan, pertanian dan sosial. Kolaborasi ini akan membantu mengembangkan program yang lebih komprehensif dan terintegrasi untuk meningkatkan implementasi hak anak atas kesehatan.

Rekomendasi utamanya adalah meningkatkan kapasitas petugas kesehatan di tingkat lokal. Dengan pelatihan dan dukungan yang tepat, petugas kesehatan di puskesmas, poshandu, dan fasilitas kesehatan lainnya akan mampu memberikan pelayanan yang lebih berkualitas. Hal ini mencakup pemahaman menyeluruh mengenai pola makan sehat dan deteksi dini kemungkinan kasus stunting.

Rekomendasi berikut berfokus pada peningkatan ketersediaan dan kualitas air bersih dan sanitasi. Kebersihan yang buruk dapat menjadi faktor risiko terjadinya stunting. Oleh karena itu, investasi pada infrastruktur sanitasi dan penyediaan air bersih bagi masyarakat marginal atau kurang terlayani harus menjadi prioritas. Hal ini juga dapat mencakup program pendidikan dan kesadaran mengenai kebersihan lingkungan. Penguatan regulasi dan penegakan hukum terkait gizi anak juga menjadi rekomendasi yang perlu mendapat perhatian. Penegakan hukum dan peraturan yang mendukung upaya stunting dan penerapan sanksi terhadap tindakan yang melemahkan hak anak atas kesehatan dapat memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi anak dari risiko stunting.

Relevan dalam konteks ini adalah rekomendasi untuk memperkuat kerja sama dengan organisasi internasional dan Organisasi Kesehatan Dunia. Bekerja sama dengan para pemangku kepentingan ini dapat memberikan manfaat dalam bentuk bantuan teknis, sumber daya keuangan, dan akses terhadap inovasi terkini dalam penanganan stunting. Pentingnya pemantauan dampak sosial dan ekonomi dari program stunting juga harus ditekankan. Penilaian dampak kesehatan non-fisik, seperti: B. Peningkatan akses terhadap pendidikan dan peningkatan produktivitas ekonomi akan memberikan pandangan yang lebih komprehensif mengenai keberhasilan program dan membantu mengembangkan intervensi yang lebih komprehensif.

Upaya mendalam juga diperlukan untuk melibatkan sektor pendidikan dan mendorong integrasi program pendidikan dengan program yang memenuhi hak kesehatan anak. Sekolah dapat menjadi platform yang efektif untuk mengkomunikasikan informasi tentang makan sehat kepada anak-anak dan keluarga mereka. Program stunting yang diintegrasikan ke dalam pendidikan dapat mempunyai dampak jangka panjang terhadap kesehatan dan perkembangan anak. Rekomendasi tersebut juga mencakup langkah-langkah dukungan sosial bagi keluarga yang berisiko tinggi mengalami stunting. Program bantuan sosial, khususnya yang menysasar rumah tangga miskin, dapat membantu meningkatkan akses terhadap makanan bergizi dan layanan kesehatan. Dukungan ini akan membantu mengurangi kesenjangan kesehatan dan memfasilitasi realisasi hak anak atas kesehatan di berbagai tingkat masyarakat.

Inisiatif perlindungan hak kesehatan anak-anak yang mengalami stunting di tiga kabupaten besar di Provinsi Jawa Timur, yaitu Jember, Situbondo dan Bondowoso, bertujuan untuk menurunkan prevalensi stunting secara signifikan. Tujuan ini bertujuan untuk mengurangi angka stunting di daerah-daerah tersebut dan membantu mereka mencapai tingkat yang lebih rendah melalui program kesehatan yang ditargetkan dan intensif. Tujuan ini secara khusus mempertimbangkan keadaan dan karakteristik unik masyarakat lokal sehingga upaya pencegahan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing kabupaten.

Manfaat yang diperoleh dari pencapaian tujuan ini sangat besar, terutama dalam hal kesejahteraan anak dan perkembangan sosial. Mengurangi prevalensi stunting dapat memberikan

---

<sup>8</sup> A. N. Trisna, *Komitmen Pemerintah Desa Waleran Dalam Percepatan Penurunan Stunting*, *Jurnal Kesehatan Tambusai Vol. 4, No. 4*, (2023), hlm 6469-6474.

kontribusi positif bagi kesehatan generasi mendatang dan menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal. Hal ini akan menciptakan generasi yang lebih tangguh secara fisik dan mental serta lebih mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan masyarakat dan ekonomi di tingkat lokal.

Memasukkan tiga kabupaten dengan prevalensi stunting yang tinggi akan meningkatkan manfaat secara keseluruhan. Upaya ini berpotensi menciptakan efek positif dalam mengurangi stunting di tingkat negara bagian. Selain itu, manfaatnya juga dirasakan dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan bagi anak, mendukung pendidikan gizi, serta menciptakan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi dan pola makan sehat. Data mengenai prevalensi stunting menunjukkan betapa pentingnya tujuan dan manfaat tersebut.<sup>9</sup> Prevalensi stunting di Kabupaten Jember sebesar 34,9 persen, Situbondo sebesar 30,9 persen, dan Bondowoso sebesar 32 persen menunjukkan perlunya upaya nyata untuk memperbaiki keadaan tersebut. Mengingat angka-angka ini mencerminkan tantangan serius yang dihadapi anak-anak di wilayah ini, maka tujuan melindungi hak atas kesehatan anak-anak yang mengalami stunting menjadi lebih penting.

Di Kabupaten Jember, tujuan Program Kesehatan Anak Stunting adalah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap lebih dari sepertiga anak yang menderita stunting. Oleh karena itu, manfaatnya adalah anak Jember mengalami peningkatan kesejahteraan dan potensi tumbuh kembang yang optimal. Situbond, dimana angka stunting mencapai 30,9 persen, juga akan merasakan manfaat serupa, yaitu memungkinkan lebih dari seperempat anak-anak tumbuh dan berkembang dalam kondisi kesehatan yang baik. Sementara itu, dengan prevalensi stunting yang mencapai 32%, Bondowoso akan mendapatkan manfaat positif dalam mengatasi permasalahan kesehatan anak di tingkat masyarakat. Tercapainya tujuan mewujudkan hak kesehatan bagi anak-anak stunting di Bondowoso akan memberikan harapan baru bagi anak-anak di kabupaten tersebut untuk masa depan yang lebih berkualitas.

Dengan mencapai tujuan dan manfaat tersebut, program kesehatan anak stunting di Jember, Situbondo dan Bondowoso tidak hanya secara langsung meningkatkan status kesehatan anak, namun juga memberikan kontribusi terhadap dampak sosial dan ekonomi di tingkat masyarakat. pada pengembangan. Oleh karena itu, upaya tersebut tidak hanya akan mengurangi stunting, tetapi juga membangun landasan yang kuat bagi generasi mendatang.

Selain itu, mewujudkan hak atas kesehatan anak-anak yang mengalami stunting di ketiga kabupaten tersebut merupakan fokus utama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dengan fokus khusus pada pemberantasan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi. Kami akan berkontribusi aktif untuk mencapai SDG2. Dengan mengurangi prevalensi stunting, program ini akan berkontribusi terhadap pencapaian indikator utama SDG 2, yaitu mengurangi angka kelaparan dan meningkatkan gizi anak.

Manfaat program kesehatan bagi anak stunting di Jember, Situbondo dan Bondowoso juga mencakup peningkatan daya saing daerah dalam hal kesejahteraan dan pembangunan manusia. Anak-anak yang tumbuh sehat berpotensi menjadi anggota masyarakat yang lebih kaya di masa depan. Dengan demikian, pencapaian tujuan ini akan membangun masyarakat yang lebih tangguh dan berkontribusi aktif terhadap pembangunan daerah masing-masing<sup>10</sup>. Dari perspektif dampak kesehatan jangka panjang, program ini diharapkan dapat mengurangi beban penyakit kronis dan biaya pengobatan di masa depan. Anak yang tumbuh sehat akan lebih terhindar dari berbagai penyakit yang berhubungan dengan gizi buruk, seperti stunting, kekurangan vitamin, dan penyakit kronis lainnya. Oleh karena itu, melindungi hak kesehatan anak-anak yang mengalami stunting di Jember, Situbondo dan Bondowoso juga akan mengurangi tekanan pada sistem layanan kesehatan, meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. .

Data tingginya prevalensi stunting di ketiga kabupaten tersebut juga memberikan alasan kuat untuk mendorong pengambil kebijakan memprioritaskan program kesehatan anak. Dengan menyoroti masih tingginya prevalensi stunting, program ini dapat memotivasi pemerintah daerah untuk meningkatkan alokasi anggaran dan sumber daya guna mendukung keberhasilan program kesehatan

---

<sup>9</sup> D. A. Ramadhan, *Pertanggungjawaban Negara Terhadap Permasalahan Anak Stunting Di Indonesia. Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1*, (2024), hlm 14-26.

<sup>10</sup> R. Mardiansyah, *Dinamika Politik Hukum Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Di Indonesia . Vej Vol. 4 No. 1*, (2018), hlm 127-133.

anak stunting. Program ini juga memberikan dampak positif terhadap hak asasi manusia dengan memastikan bahwa hak anak atas kesehatan dilaksanakan secara adil dan merata. Mengurangi kesenjangan kesehatan regional berarti menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Program ini tidak hanya bertujuan untuk mencapai tujuan kesehatan, namun juga menegaskan hak setiap anak atas pertumbuhan dan perkembangan yang sehat tanpa diskriminasi.

Selain itu, melindungi hak atas kesehatan anak-anak yang mengalami stunting dapat meningkatkan tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang gizi anak. Program ini akan membangun platform pendidikan yang kuat untuk memastikan masyarakat memahami pentingnya nutrisi yang tepat dan cara mencegah stunting. Dengan cara ini, program ini juga membantu masyarakat berperan aktif dalam menjaga kesehatan anak.

Rekomendasi dan implementasi program kesehatan anak stunting di Jember, Situbondo dan Bondowoso akan memberikan bukti empiris keberhasilan intervensi di tingkat masyarakat. Data hasil program dapat digunakan untuk memberikan masukan bagi pengembangan kebijakan kesehatan anak yang lebih efektif di tingkat nasional dan memberikan panduan kepada daerah lain yang menghadapi tantangan serupa. Dengan cara ini, program ini berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas dan pembelajaran kolaboratif untuk meningkatkan implementasi hak anak atas kesehatan secara keseluruhan.

## **SIMPULAN**

Dalam konteks mewujudkan hak atas kesehatan anak stunting di Jawa Timur, perspektif hak asasi manusia merupakan landasan penting untuk memandu kebijakan dan program berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang, data dan analisis yang diuraikan, dapat disimpulkan bahwa upaya perlindungan hak kesehatan anak stunting harus diintegrasikan sepenuhnya ke dalam kerangka hak asasi manusia. Fokus utama dalam perancangan dan pelaksanaan program kesehatan adalah agar semua anak mempunyai hak atas pertumbuhan dan perkembangan yang optimal melalui akses terhadap layanan kesehatan yang setara tanpa diskriminasi.

Meskipun data prediktif menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Jawa Timur mengalami penurunan, namun harus diakui bahwa masih terdapat tantangan yang signifikan. Oleh karena itu, rekomendasi pertama adalah mengintensifkan upaya pencegahan stunting melalui pendekatan berbasis hak asasi manusia. Hal ini mencakup peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan, pendidikan gizi masyarakat, dan pemantauan ketat terhadap pelaksanaan program. Selain itu, kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, lembaga hak asasi manusia, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta, harus diperkuat. Sinergi ini dapat memperkuat implementasi program, menghasilkan dukungan yang lebih luas, dan memastikan respons komprehensif terhadap permasalahan stunting yang kompleks. Dalam konteks ini, penguatan peran lembaga pengawas dan audit keuangan juga sangat penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kesehatan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- A. Gonggong, *Sejarah Pemikiran Hak-Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1995
- M. Ashri, *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*. Makassar : CV. Social Politic Genius, 2018
- N. Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2022
- R. Indah, *Promosi Kesehatan Dalam Berbagai Perspektif*. Syiah Kuala University Press, 2022

### **Jurnal**

- A. N. Trisna, Komitmen Pemerintah Desa Waleran Dalam Percepatan Penurunan Stunting, *Jurnal Kesehatan Tambusai Vol. 4, No. 4, 2023*
- D. A. Ramadhan, Pertanggungjawaban Negara Terhadap Permasalahan Anak Stunting Di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1, (2024)*
- D. Shofiya, Komitmen Pimpinan Pada Penurunan Stunting Di Kabupaten Tuban Jawa Timur. *Media Gizi Indonesia (National Nutrition Journal) Vol. 1 No. 1, 2022*

**Farrah Miftah**, *Pemenuhan Hak Atas Kesehatan terhadap Anak Stunting Di Jawa Timur dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*

- H. Affandi, Mplementasi Hak Atas Kesehatan Menurut Undang-Undangdasar 1945: Antara Pengaturan Dan Realisasi Tanggung Jawab Negara, *Jurnal Hukum Positum Vol. 4, No. 1*, 2019
- R. Mardiansyah, Dinamika Politik Hukum Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Diindonesia . *Vej Vol. 4 No. 1*, 2018
- Simbolon, L. A, Gagalnya Perlindungan Anak Sebagai Salah Satu Bagian Dari Hak Asasi Manusia Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Mazhab Utilitarianisme, *Jurnal Yuridis*, 3(2), 2016